



# RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
(ZI)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA  
KOTA DENPASAR

**2023**

oleh :

Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI)  
RSUD Wangaya kota Denpasar

**TIK  
KORUPSI**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA  
KOTA DENPASAR TAHUN 2023**

Oleh : TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
**RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR 2023**

RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR  
TAHUN 2023



Mengetahui  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya  
Kota Denpasar

dr. Anak Agung Made Widiasta, Sp.A., MARS  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701002 200012 1 005

Tim Pembangunan Zona Integritas  
Ketua

Drs I Ketut Sutikayasa  
Pembina  
NIP. 19651225 199503 1003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan Pemerintahan yang sederhana, simple, lincah, dan cepat. Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan Presiden selalu menyampaikan bahwa yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat, berbelit-belit dan terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan public yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang disertai dengan Surat Keputusan Bersama dengan lima pimpinan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, maka perlu dibangun ZI pada kawasan-kawasan strategis. Unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan

yang ditunjuk untuk membangun ZI wajib membangun ZI di internal unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan. Sehingga pembangunan ZI akan semakin banyak dilakukan di kawasan dan unit-unit kerja/satuan kerjanya. Dalam proses pembangunan ZI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014, masih banyak kendala terkait bagaimana mekanisme evaluasi pembangunan ZI yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Salah satunya terkait SDM yang melaksanakan evaluasi, tahapan evaluasi yang harus dilakukan, serta pengisian lembar kerja evaluasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta keberlanjutan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, maka diperlukan menyusun rencana kerja pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

## 1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBM).

2. Memberikan keseragaman, pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar.

#### 1.4 Pengertian Umum

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
2. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Kawasan adalah area yang terdiri dari beberapa unit kerja/satuan kerja lintas instansi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
6. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun zona integritas.
7. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi pembangunan ZI di unit kerja/satuan kerja yang diusulkan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

serta unsur dari instansi pemerintah lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam evaluasi pembangunan ZI.

8. Menteri adalah orang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
9. Kementerian adalah organisasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB II

### PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

#### 2.1 Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi / pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
2. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan / melengkapi setelah perencanaan pembangunan Zona Integritas.
3. Pencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### 2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

**BAB III**  
**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Pembentukan Tim Kerja	SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Menyusun SOP pemilihan tim kerja ZI  Pemilihan calon anggota Tim Pembangunan ZI sesuai Prosedur	SOP Pemilihan Tim Kerja ZI  SK Tim Kerja Zona Integritas Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	Maret 2023
2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat dan di sosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, menentukan rencana aksi tahun 2022, mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, sosialisasi melalui website	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI yang dipublikasikan di website Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar	April 2023
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala per triwulan	Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM setiap 3 bulan sekali, tindak lanjut hasil Monev sebelumnya	Undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat, Lembar Monev ZI, bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil Monev Selanjutnya	Setiap 3 bulan (triwulan) 2023
4	Perubahan pola pikir dan budaya	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran tepat waktu</li> <li>- Disiplin dalam pemakaian pakaian kerja dan atribut</li> <li>- Hadir setiap rapat yang memerlukan keputusan pimpinan</li> </ul>	Daftar hadir	Januari – Mei 2023
		Agen perubahan sudah ditetapkan	Menyusun SOP Pemilihan anggota Agen Perubahan  Menetapkan SK Agen Perubahan	SOP Pemilihan anggota Agen Perubahan  SK Tim Agen Perubahan	Juli 2023  April 2023
		Budaya kerja dan pola pikir sudah dibangun dilingkungan organisasi	Pengarahan Direktur RSUD Wangaya untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi pegawai	Undangan, Daftar Hadir Rapat, Notulen	April – Desember 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
			dalam pembangunan ZI melalui rapat direksi, rapat-rapat dan apel disiplin		
		Para pegawai terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Rapat Pembangunan Zona Integritas, Penandatanganan pakta integritas	Undangan, Daftar Hadir Rapat, Notulen	April – Juni 2023
<b>II PENATAAN TATA LAKSANA</b>					
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada peta proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai serta SOP telah dievaluasi	Seluruh unit telah memiliki SOP yang telah ditetapkan, SOP tersedia di ruang pelayanan. SOP sudah dilaksanakan, evaluasi dokumen SOP	SOP Pelayanan, Laporan Hasil Evaluasi SOP	Mei – Desember 2023
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Absen aplikasi android, penggunaan SIMPEG SIMAKDIHATI, Sisdmk, e-formasi, SAPK, Renbut, Si-ASN. Ekinerja pada manajemen kepegawaian, penggunaan WA grup untuk komunikasi internal	Aplikasi HRD, bukti penggunaannya WA Grup	April – Desember 2023
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	SIMRS, Pendaftaran Online, Hospital Bad Management, Antrian online poliklinik	Bukti – bukti System	April 2023
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT pemberian layanan publik telah dilakukan monev secara berkala	Melakukan Monev pemanfaatan IT setiap tiga bulan sekali dengan mengisi formulasi MONEV	Formulir Monev pemanfaatan IT yang telah diisi	Setiap 3 Bulan (Tri Wulan I)
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Telah di bentuk Tim PPID, Struktur dan Uraian Tugas PPID RSUD Wangaya  Menampilkan Standar pelayanan public, RBA, RSB, Laporan Tahunan dalam website, dibentuknya PPID, menyediakan form	SK PPID, ruang PPID. Form pengaduan, kotak saran, sms centre, pengaduan via website  Bukti Capture	April 2023  April 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
			pengaduan, kotak saran, sms centre, barcode pengaduan, pengaduan melalui website		
		Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala	Mengevaluasi, Menyusun laporan PPID, Menyusun laporan pengaduan	Evaluasi dokumen SPP sekali dalam setahun, Laporan bulanan PPID dan pengaduan	Desember 2023
<b>III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>					
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun analisa kebutuhan pegawai,</li> <li>Menyusun ANJAB ABK</li> <li>- Input sistem e-formasi</li> </ul>	Dokumen ANJAB ABK, Laporan analisa Kebutuhan Pegawai	April 2023
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Menyusun Analisa Kebutuhan Pegawai, Menyusun ANJAB ABK, Mutasi / Penempatan pegawai sesuai perencanaan kebutuhan	SK Penempatan pegawai	Maret 2023
		Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai	Membuat Analisa SKP	Dokumen Analisa SKP	Desember 2023
2	Pola Mutasi Internal	Mutasi pegawai antar jabatan sebagai upaya pengembangan karir pegawai	Mutasi Pegawai	SK Mutasi / surat tugas	April 2023
		Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Prosedur Mutasi Internal	Dokumen Prosedur Mutasi Internal	Maret 2023
		Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan secara berkala	Membuat monitoring dan evaluasi efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	Desember 2023
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui TOR, Form perencanaan pendidikan dan pelatihan, Analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	TOR usulan <i>in House Training</i> atau magang, Form Perencanaan Pendidikan, Analisa Kebutuhan Diklat Fungsional tertentu non fungsional tertentu	Mei 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai pada lembaga pelatihan	Mengisi Form perencanaan pendidikan dan pelatihan sesuai formulir	Form Perencanaan pendidikan dan pelatihan tahun 2021	Mei 2023
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Menyusun evaluasi kinerja pegawai	Prosentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran Analisis mutasi pegawai	Desember 2023
			Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Pegawai yang telah mengikuti diklat	Desember 2023
			Melaksanakan <i>in house training</i> , mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh BKPSDM, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Laporan <i>in house training</i> , Bimtek, pelatihan eksternal	Desember 202
			Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifitas dan pelatihan	Desember 2023
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian SKP tahunan	SKP tahun 2022	Juni 2023
		Unit kerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian SKP struktural	SKP struktural	Februari 2023
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan : Kriteria yang jelas (SKP menjadi salah satu kriteria)	Penetapan pegawai teladan	Setiap Bulan
5	Penegakan aturan disiplin / kode etik	Aturan disiplin / kode etik / perilaku pegawai	Penyusun Panduan Etik dan Perilaku	- Buku Panduan	Maret 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
	/ kode perilaku pegawai	dilaksanakan / diimplementasikan		- Jumlah pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	
6	Sistem informasi kepegawaian	Pengelola data kepegawaian sudah memanfaatkan system teknologi informasi	Ada beberapa system yang digunakan untuk mengelola data kepegawaian : <ul style="list-style-type: none"> <li>- HRd</li> <li>- Simak Dihati</li> <li>- Anjab ABK</li> <li>- E-formasi</li> <li>- Sisdmk</li> </ul>	Print Out Hasil Input data kepegawaian	Desember 2023
<b>IV PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>					
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Direktur memberikan pengarahan dan menandatangani Lembar Pengesahan Usulan Proposal dan Rencana Kerja Kegiatan TA.2021	RSB, RBA, RKA	Maret 2023
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Direktur berperan aktif dalam menetapkan peta proses bisnis, menetapkan isu-isu strategis, indikator, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program rs, menetapkan cascading, menetapkan IKU dan Perjanjian Kinerja	- Peta proses bisnis - Pohon kinerja - Pohon masalah - Cascading - Perjanjian kinerja	Maret 2023
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Maret 2023
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen Perencanaan sudah ada	Menyusun RSB, RBA, RKA, RKT, Penetapan Kinerja	Dokumen RSB, RBA, RKA, RKT, dan IKU	Juni 2023
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun RSB, RKT, Penetapan Kinerja	RSB, RKT, Penetapan Kinerja	Juni 2023
		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menyusun IKU di RSB	Dokumen IKU	Juni 2023
		Indikator Kinerja telah SMART	Menyusun RSB, RKT, RKA	RSB, RKT, RKA	Juni 2023
		Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2020	LAKIP 2022 tepat waktu	Maret 2023
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2020	LAKIP 2022 tepat waktu	Maret 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Usulan Diklat Akuntabilitas Kinerja	Bukti Diklat	Sertifikat
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun LAKIP Sudah Pernah melakukan pelatihan	Bukti Pelatihan (sertifikat)	Sertifikat
<b>V</b>	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	Pengendalian Gratifikasi	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Menyusun SOP, memasang poster tentang gratifikasi dilingkungan RSUD Wangaya, mensosialisasikan Gratifikasi via website	SOP, Baliho, Banner	April 2023
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat laporan UPG enam bulan sekali dan pelaporan juga disampaikan di website BKP. Menyusun rencana aksi atas hasil pengendalian atas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi	Laporan UOG, Inovasi : Pelaporan Gratifikasi via Website, Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi setiap semester	Desember 2023
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pengendalian Internal telah dibangun dilingkungan Unit Kerja	Menyusun dokumen SPIP, Menetapkan SPI	SK SPI, Panduan, Program Kerja	Nopember 2023
		Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Panduan, SPO Penilaian Resiko	Dokumen Panduan dan SPO Penilaian Resiko	Juli 2023
		Dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Tim Managemen Resiko melaksanakan kegiatan pengendalian Resiko di RSUD Wangaya	Notulensi kegiatan pengendalian di LINGKUNGAN RSUD Wangaya	Juli 2023
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Sosialisasi SPI kepada seluruh pegawai	Sosialisasi terkait dengan SPI (Daftar hadir, notulen, laporan)	Januari 2023
3	Pengaduan masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Menyusun pedoman penanganan pengaduan masyarakat yang telah dibuat. Koordinasi antar pejabat terkait, mekanisme, tata kerja dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen Panduan pengaduan dan SPO	Januari 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menyusun laporan tindaklanjut pengaduan setiap bulan sekali	Laporan pengaduan per tiga bulan sekali, menampilkan laporan pengaduan via website	Desember 2023
		Dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat per semester	Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Desember 2023
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, ditindaklanjuti menampilkan laporan tersebut via website	Juli, Desember 2023
4	Whistle Blowing System	Whistle blowing system sudah diinternalisasikan	Membuat pedoman pelaksanaan Whistleblower di RSUD Wangaya, Menetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapan SK oleh pimpinan, Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan whistle blowing system	Dokumen / kebijakan WBS, SK Pimpinan terkait pengelola WBS, Undangan, daftar hadir, notulen dan data dukung lainnya, publikasi via website	Juli 2023
		Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan	Menyusun program pengendalian pelaksanaan WBS, menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS	Desember 2023
		Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti	Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS	Desember 2023 Triwulan II 2021
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan RSUD Wangaya, Pembentukan tim penanganan benturan kepentingan	Pedoman penanganan benturan kepentingan, SK Tim Penanganan benturan kepentingan	Juni 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Sosialisasi pedoman penanganan benturan pada RSUD Wangaya	Undangan Rapat, Daftar Hadir dan Notulen Rapat	Juli 2023
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Menyusun laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berupa matriks)	Laporan implementasi Penanganan Benturan Kepentingan (berbentuk matriks)	Desember 2023
		Dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember 2023
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan	Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember 2023
<b>VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>					
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan public, melengkapi SOP, Pelaksanaan Akreditasi	Standar Pelayanan, SPO dan Sertifikat Akreditasi	Desember 2023
		Standar pelayanan telah di maklumkan dan telah dipublikasi	Menyusun maklumat pelayanan, mensosialisasikan maklumat pelayanan via website	Maklumat standar pelayanan Inovasi, Maklumat tercantum di website	April 2023
		Terdapat SOP bagi pelaksana standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan mudah diakses oleh semua orang	Februari 2023
		Dilakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan	Melaksanakan kaji ulang dokumen, dan Evaluasi SOP	Reuiu SOP	Agustus 2023
2	Budaya Pelayanan Prima	Dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Direktur pada rapat atau apel pagi	Undangan, Daftar Hadir, dan Notulen	April 2023
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang persyaratan pelayanan ditampilkan ditempat strategis, disediakan dalam bentuk poster, leaflet dan juga ditayangkan di website	Foto, poster, leaflet, screenshot website	April 2023
		Terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana pelayanan	Menyusun prosedur pemberian sanksi/reward bagi	Prosedur pemberian sanksi/reward bagi pelaksana layanan	Agustus 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
			pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Memberikan sanksi/reward bagi pelaksana layanan	serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Memberikan sanksi/reward bagi pelaksana layanan	
		Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	SIMRS, IRIT, GERIATRI	Dokumen	April 2023
		Terdapat Inovasi Pelayanan	Apdol, Japri Si Ibu	Dokumen	April 2023
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Menindaklanjuti hasil IKM	Analisis IKM dan tindak lanjutnya	Maret 2023
4	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey IKM	Laporan IKM	Maret 2023
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelanggan (IKM)	Screenshot dari website	Maret 2023
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat			April 2023
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Teknologi informasi dalam memberikan pelayanan telah diterapkan	Penerapan EMR, pembayaran dengan Qris, Pendaftaran Online	Screenshot dari website	April 2023
		Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Aplikasi	Januari 2023
		Dilakukan perbaikan secara terus menerus	Monitoring dan Evaluasi	Undangan, daftar hadir, dan notulen	Juli 2023

Lampiran 1.

MEKANISME PENATAPAN TIM ZONA INTEGRITAS  
RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR

1. Wadir Administrasi Umum dan Keuangan membuat rencana kegiatan dan mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi kebutuhan personil Tim Kerja Agen Perubahan RSUD Wangaya Kota Denpasar.
2. Wadir Administrasi Umum dan Keuangan mengusulkan data-data pegawai yang ada sesuai kompetensi, pangkat dan golongan.
3. Direktur memeriksa dan mendisposisikan Memorandum kepada Wadir Administrasi Umum dan Keuangan untuk membuat draft Keputusan Tim Zona Integritas sesuai usulan yang telah disetujui oleh Direktur.
4. Wadir Administrasi Umum dan Keuangan membuat draft Keputusan dan mengajukan kepada Direktur untuk mendapat persetujuan dan Tanda Tangan Direktur.
5. Wadir Administrasi Umum dan Keuangan menetapkan melalui “Keputusan” Tim Zona Integritas.
6. Wadir Administrasi Umum dan Keuangan menindaklanjuti pengelolaan SK dan meneruskan kepada Tim Kerja.
7. Wadir Administrasi Umum dan Keuangan melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Mutu, mendokumentasikan Keputusan Tim Zona Integritas.

Direktur RSUDW

**DOKUMEN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS  
RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR**

No	Target Prioritas
1	2
1	Pembentukan Tim Zona Integritas
2	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan startegis RSUD Wangaya Kota Denpasar, Reviu RHR ( <i>Rapid Hospital Readies</i> ), Evaluasi pelayanan melalui morning report setiap hari, rapat Direksi, rapat pejabat struktural, rapat unit-unit dan instalasi, pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu, serta penerapan standar pelayanan publik.
6	Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
7	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan
8	Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai
9	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
10	Peningkatan akuntabilitas kinerja
11	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
12	Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
13	Menetapkan Agen Perubahan
14	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
15	Pelaporan kegiatan Tim ZI

Direktur RSUD Wangaya